

**Notulensi Rapat
Joint Working Group Meeting
Aceh Public-Private Dialogue
Banda Aceh, Hotel Madinah, 26 Agustus 2008**

Waktu: 09.00 – 12.00 AM

Agenda:

- a. Sambutan Setda NAD (diwakili oleh Kepala Dinas Perindagkop)
- b. Pembukaan oleh co-chairpersons
- c. Penyampaian wakil pihak Swasta
- d. Respon wakil pemerintah
- e. Pembahasan rekomendasi dan respon secara details
- f. Kesimpulan dan agenda pertemuan berikutnya

Peserta:

Total jumlah peserta 50 orang, terdiri dari 35 dari swasta dan 15 dari pemerintah.

Ringkasan jalannya rapat

- Joint WG Meeting ini dibuka dengan penyampaian laporan dari Sekretariat tentang perkembangan dan rencana PPD kedepan
- Selanjutnya Sambutan dan Peresmian acara oleh Bapak Cipta Hunai, mewakili Sekda Prov. NAD
- Setelah coffe break, WG meeting dilanjutkan. Mengingat kehadiran Pemerintah yang tidak maksimal dan atas kesepakatan semua pihak, pertemuan yang sebelumnya direncanakan terpisah dalam WG masing-masing, diputuskan untuk digabung.
- Co-chair Agribisnis Bapak Salahuddin Alfata dan co-chair Pariwisata, Perdagangan & Industri Bapak Dahlan Sulaiman menjadi wakil pihak swasta; . sementara Bapak M. Dahlan (Biro Perekonomian) dan Bapak Badaruddin Daud menjadi co-chairs dari Pemerintah.
- Rapat berlangsung selama dua jam dengan masing-masing WG mengambil porsi waktu satu jam, dimulai dengan WG Agribisnis dan kemudian disusul Pariwisata, Perdagangan & Industri.
- Rapat dimulai dengan pemaparan oleh swasta, diikuti dengan respon Pemerintah, serta ditutup dengan diskusi dari semua yang hadir.

Kesimpulan rapat

1. Kehadiran wakil pemerintah tidak seperti yang diharapkan; selain jumlah pesertanya tidak lengkap (ada Dinas yang tidak mengirimkan wakilnya), juga kapasitas yang hadir tidak memadai (banyak persoalan yang disampaikan tidak bisa terjawab dengan tuntas)
2. Pembahasan rekomendasi dan jawaban pemerintah dalam Matriks tidak tuntas dan masih menyisakan berbagai pertanyaan lanjutan, disebabkan oleh hal diatas.
3. Diantara beberapa isu/rekomendasi WG Agribisnis yang harus dibahas lebih detail adalah status pelabuhan, langkah konkrit pemerintah dalam menangani persoalan pupuk dan bibit, serta peraturan perundangan yang mengatur perikanan.
4. Untuk WG Pariwisata, Perdagangan dan Industri, persoalan yang masih harus dijawab adalah mengenai keterlibatan swasta (stakeholders lain) dalam penyusunan qanun pariwisata, konsep konkrit pariwisata Aceh, bantuan terhadap pengusaha korban tsunami, peraturan yang mengatur industri rotan, keagenan ganda produk olahan (elektronik, makanan, dll), dan status Sabang sebagai freeport & free trade zone.
5. Semua peserta mengatakan acara dialog ini sangat penting sehingga harus dijadwal dan dipersiapkan dengan sangat baik.

Next Step

1. Akan diadakan pertemuan terbatas antara pihak Pemerintah Aceh beserta Dinas/Badan terkait dengan perwakilan pihak swasta (semua Co-chairpersons), untuk membicarakan mekanisme kerja dan Working Group meeting yang lebih efisien dan efektif. Pertemuan ini direncanakan pada minggu pertama bulan September 2008.
2. Pihak Pemerintah Aceh melengkapi dan menanggapi semua rekomendasi swasta secara lebih lengkap dan konkrit. Ini akan dilakukan oleh dinas terkait dibawah koordinasi Sekretariat di Biro Perekonomian. Paling tidak akhir September 2008, respon dan penjelasan Pemerintah sudah bisa disampaikan ke pihak swasta.
3. Pertemuan ini perlu dilanjutkan untuk menuntaskan semua rekomendasi dan respon pemerintah. Mengingat pentingnya event ini, maka kehadiran pimpinan Dinas terkait sangat dibutuhkan serta harus dibuat secara tersendiri, sesuai WG yang telah ditetapkan. Pertemuan kedua Joint WG ini waktu dan agendanya harus disepakati oleh kedua pihak secepatnya – minimal akhir September 2008.

Rincian Jalannya Rapat

A. Kelompok Kerja Agribisnis

Bapak Sahalahuddin Alfata (SA) memulai rapat gabungan Working Group Agribisnis. SA memaparkan kembali permasalahan yang telah di rangkum dalam rapat sektor swasta Agribisnis.

Beberapa isu yang menjadi pembahasan dalam Working Group Agribisnis:

1. Pelabuhan

Ibu Netty Muharni, dalam menjawab permasalahan fasilitas pelabuhan yang belum memadai, menyebutkan memang beberapa kegiatan ekspor sudah berlangsung di daerah lain, seperti Aceh Selatan dan Meulaboh. Tapi belum ada pelabuhan yang berstandar internasional (untuk kegiatan ekspor/impor).

2. Peraturan yang berubah-ubah

Bapak Isa Idris, pengusaha rotan, menyinggung tentang permasalahan sertifikasi. Peraturan kehutanan selalu berubah ubah, tidak pernah tetap. Hal ini menyulitkan pengusaha dalam hal memahami peraturan untuk tiap komoditi. Misalnya izin yang diberikan untuk komoditi rotan terlalu kecil sehingga untuk melakukan kegiatan ekspor (dalam jumlah besar) menjadi tidak memungkinkan.

Bapak Dahlan (Biro Perekonomian) menjawab mengenai peraturan yang selalu berubah-ubah; untuk lebih lanjut beliau menanyakan klarifikasi kepada staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang hadir. Namun, yang bersangkutan tidak bisa memberi keterangan karena diluar tugas dan wewenangnya. Isu ini akan dibawa lebih lanjut ke Dishutbun, terutama pejabat yang berwenang.

3. Pengelolaan komoditas rotan

Bapak Razali, Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia NAD menyampaikan APRI sudah melakukan persiapan-persiapan agar rotan di Aceh bisa memiliki nilai lebih dan manfaat yang luas. Razali juga mempertanyakan kenapa kepala dinas selalu tidak datang di tiap-tiap pertemuan. Dia mencontohkan ketika ada persoalan mengenai pelabuhan kuala langsa, pegawai yang ditunjuk tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Razali mengharapkan supaya pada pertemuan selanjutnya ketua dinas dapat hadir.

Bapak Dahlan (Biro Ekonomi) menjawab saran Razali akan ditampung.

4. Lemahnya kualitas produk

Dinas Pertanian menjawab tidak benar kualitas produk Aceh rendah; bahkan komoditas aceh sebenarnya sangat berkualitas (diberi contoh kentang). Tapi karena biasanya diekspor melalui Medan/provinsi lain, maka seakan-akan komoditas tersebut (yang berkualitas tinggi) bukan berasal dari Aceh.

Co-chair menjelaskan bahwa inti persoalan sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mengangkat perekonomian Aceh, dimana pelakunya adalah pihak swasta, dan difasilitasi oleh pemerintah.

Fakta kualitas kentang yang buruk ini didapatkan dari pihak swasta, bukan rekayasa. Jadi Pemerintah disini seharusnya menanggapi dan berusaha memfasilitasi apa yang perlu/harus diberikan agar persoalan real ini bisa ditangani. Misalnya, apakah kualitas kentang yang buruk ini disebabkan oleh kualitas fasilitas jalan yang tidak baik, sehingga memperlambat waktu angkut komoditas dan kemudian mutunya turun?!

B. Kelompok Kerja Pariwisata, Perdagangan dan Industri

Rapat gabungan kemudian di sambung oleh Dahlan Sulaiman, **Co-chair utk Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Industri.**

1. Co-chair menegaskan bahwa kegiatan hari ini sangat penting. Tapi nampaknya belum ada kepedulian yang tinggi berkaitan dengan isu-isu dan respon yang diberikan baik dari pihak swasta/pemerintah. Perlu ada keseriusan agar apa yang dilakukan ini tidak menjadi sia-sia.
2. Sudut pandang/persepsi antara pihak swasta dan pemerintah belum sejalan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dialog selayaknya memposisikan dirinya secara serius. Tugas pemerintah adalah bagaimana menggiring para pengusaha untuk melakukan diversifikasi usaha dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Co-chair selanjutnya menjelaskan problema yang di hadapi sektor pariwisata, perdagangan dan industri diantaranya:
 - Regulasi/Qanun kepariwisataan Aceh belum ada
 - DPRA perlu segera mengeluarkan Qanun pariwisata dengan melibatkan seluruh stakeholders di sektor pariwisata
 - Syariat Islam vs pariwisata; Bandar Wisata Islami belum ada konsep pelaksanaan yang jelas
 - Implementasi dari konsep yang sudah dibangun (antara dinas pariwisata dan stakeholder pariwisata sebenarnya memiliki pandangan yang serupa), hanya dalam implementasiannya yang belum ada kejelasan dan masih tumpang tindih.
 - Peraturan/perizinan, berkaitan dengan pemberian izin untuk biro wisata, agen perjalanan, dll.
 - Di dalam arah pembangunan NAD, pariwisata termasuk dalam arah pembangun aceh. APBD untuk pariwisata sangat kecil.
 - Pungutan liar (sektor pariwisata)
 - Fasilitas infrastruktur (jalan misalnya) menuju destinasi wisata terbengkalai. Contoh jalan ke kilometer 0 di sabang tidak pernah dibangun walaupun sudah rusak bertahun tahun.

Pak Badaruddin bertindak sebagai co-chair dari pemerintah untuk sektor pariwisata, perdagangan dan industri menjelaskan posisi pemerintah secara umum dan kemudian meminta dari Dinas-dinas terkait untuk menjawab secara spesifik isu dan rekomendasi yang dikemukakan oleh swasta.

Ibu Irma (Disbudpar) menjawab beberapa pertanyaan dari dunia usaha pariwisata sebagai berikut:

1. **Masalah regulasi**

Saat ini sudah dibahas tetapi belum selesai. Draft Qanun sudah dikembalikan ke dinas pariwisata dan kebudayaan karena ada penggabungan dinas (Pariwisata dan Kebudayaan) sehingga draft qanun tersebut harus dirubah kembali disesuaikan dengan perubahan tersebut.

2. **Konsep pariwisata**

Memang masih belum jelas berkaitan dengan konsep Bandar Wisata Islami. Dinas provinsi sendiri sedang mencari konsep yang sesuai untuk pariwisata di NAD. Konsep Islami sendiri sebenarnya adalah konsep untuk Kota Banda Aceh

3. **Perizinan**

Dinas saat ini telah mengeluarkan beberapa izin, tapi terkait Event Organizer – yang saat ini terdaftar sebanyak 24 Event Organizer, izinnya bukan dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

4. **SDM Dinas**

Diakui memang kualitas SDM di pemerintahan masih rendah. Hal ini juga berkaitan dengan sedikitnya anggaran yang disediakan untuk Disbudpar, sehingga menyulitkan dalam pengembangan SDM.

5. **Negative campaign dari KBRI di luar**

Disbudpar menerima rekomendasi dari swasta untuk isu ini. Secepatnya Dinas akan membuat draft Surat Gubernur yang akan ditujukan kepada KBRI di Eropa dan Amerika Utara.

Diakui memang sebelum tsunami Aceh termasuk daerah yang dalam daftar hitam untuk wisatawan, namun ini belum dicabut. Mungkin harus diinformasikan kembali ke KBRI mengenai hal ini. Ada banyak email dari wisatawan berbagai negara yang ingin ke Aceh, tapi beberapa KBRI, seperti di Jerman, tidak memberikan izin kepada warga asing untuk berkunjung ke Aceh.

6. **Pengembangan situs wisata**

Disarankan supaya tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk mengajukan anggaran dari Dana Otsus untuk objek dan pengembangan pariwisata. Untuk tahun ini, dari Dinas hanya mengalokasikan Rp.171 miliar untuk pengembangan daerah wisata, namun tidak semuanya disetujui.

7. **Buruknya infrastruktur jalan**

Perbaikan fasilitas jalan ke Kilometer Nol (KM 0) di Sabang akan dimulai pada bulan September 2008.

8. **Terbatasnya bahan promosi**

Bahan promosi memang sangat terbatas dan sangat bergantung dengan anggaran. Tahun ini banyak sekali dibutuhkan anggaran untuk promosi pariwisata. Untuk menjawab permasalahan ini, perlu kerjasama dengan sektor swasta pariwisata. Tahun-tahun yang lalu sudah pernah ditawarkan untuk kerjasama, namun pihak swasta merasa hal tersebut tidak memungkinkan karena kondisi usaha yang juga tidak baik pada saat itu.

Pak Badaruddin menambahkan, pemerintah dan swasta mungkin bisa bekerja sama berkaitan dengan promosi (bahan-bahan promosi misalnya, booklet, brosur, etc). Hal ini ditanggapi baik oleh peserta.

Bapak Dahlan Sulaiman menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan di Aceh, seperti Sumatra Internastional Travel Fair sebagai bagian untuk promosi wisata Aceh. Untuk promosi sangat diperlukan brosur, leaflets, dsb. Pelaku bisnis pariwisata siap sekiranya dipertemukan dengan legislatif DPRA guna memperjuangkan anggaran untuk peningkatan iklim wisata Aceh

Mengenai permasalahan di sektor industri, Ibu Netty (Disperindagkop & UKM) memberikan beberapa penjelasan.

1. **Keagenan ganda**

Menjawab isu ini, ibu Netty mengatakan sebagai akibat masih belum siapnya pengusaha lokal. Isu keagenan ganda dan ketidaksiapan pegusaha Aceh dalam menangkap peluang bisnis ini terlihat dari kasus Maspion, yang menawarkan keagenan khusus utk Aceh. Tetapi sampai sekarang tidak ada pengusaha Aceh yang siap dan menangkap tawaran ini.

Masalah Sabang Freeport juga menjadi contoh tidak ada kesiapan di lapangan.

2. **Sabang Freeport,**

Bapak Salahuddin Alfata menjelaskan ada kendala dari pengelolaan pelabuhan di Sabang. Awalnya Pemerintah diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kerjasama antara BPKS, Pemprov Aceh dan Dublin Port berupa modal dalam bentuk kepemilikan pelabuhan. Ternyata pelabuhan Sabang masih dimiliki oleh Pelindo. Saat ini sedang diupayakan supaya Pelindo segera menyerahkan kepemilikan pelabuhan tersebut ke daerah, yang diperkirakan terjadi awal tahun depan. Bila ini terjadi, isu kesiapan akan teratasi.

Bapak Salahuddin juga menambahkan di Sabang akan dibuka IMT GT Plaza, dimana tidak akan diberlakukan peraturan tata niaga. Jadi di Sabang, semua

barang bisa diperdagangkan tanpa ada bea/pajak, kecuali 4 hal: senjata, narkoba, sampah beracun, dan pornografi. Ini peluang bagi pengusaha Aceh.

3. **Retribusi**

Mengenai peraturan retribusi, Bapak Dahlan Sulaiman menekankan pentingnya bagi Aceh untuk memiliki peraturan yang jelas tentang retribusi, seperti rokok. Berdasarkan survey APINDO terhadap satu merek rokok di Aceh Timur, pajak retribusi per hari untuk rokok tersebut sekitar Rp.1,5 miliar. Ini peluang yang hilang, dengan tidak adanya keagenan produk di Aceh, sehingga semua potensi pajak/retribusi lari ke Medan.

Bapak Dahlan (Biro Perekonomian), diakhir pertemuan menekankan;

- a. Menghimbau kepada dinas-dinas terkait, apa yang menjadi permasalahan yang belum tuntas hari ini, maka menjadi tugas untuk mendapatkan jawaban yang valid dan akurat, sebagai contoh Pelabuhan, pertanian, dll.
- b. Disbudpar supaya menyiapkan draft PP untuk even-even pariwisata di Aceh sebagai agenda nasional, sehingga bisa mendapat anggaran penyelenggaraan dari Pemerintah.
- c. Sebaiknya sebelum pertemuan diselenggarakan agar dilakukan inventarisir dan konfirmasi peserta yang akan hadir dari semua pihak, dan jangan hanya diundang saja. Tetapi harus diperjelas Pimpinan atau pejabat yang membidani untuk hadir.***

Co-chairpersons Working Group
Agribisnis

M. Dahlan*

Salahuddin Alfata

Pariwisata, Perdagangan & Industri

Badaruddin Daud*

Dahlan Sulaiman

Disiapkan oleh:

Luqyan Tamanni
Sekretariat PPD

Lampiran

1. Daftar peserta

A. Pemerintah

No	Nama	Instansi
	<u>WG Pariwisata, Perdagangan & Industri</u>	
1	Cipta Hunai, M.Si (<i>Kepala Dinas</i>)	Dinas Perindagkop & UKM
2	Meutia Wardani	Dinas Perindagkop & UKM
3	Netty Muharni	Dinas Perindagkop & UKM
4	Irmayani	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
5	Badaruddin Daud	Badan Investasi & Promosi
	<u>WG Agribisnis</u>	
6	Aryati Silmi	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7	Diana Samira	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
8	Iskandar	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Aida Suraya	Dinas Kehutanan & Perkebunan
	<u>Sekretariat Pemerintah Setda NAD</u>	
10	T. Sofyan	Biro Perekonomian
11	M. Dahlan	Biro Perekonomian
12	Syamsidar	Biro Perekonomian
13	Erwani	Biro Perekonomian
14	Sri Iswari	Biro Perekonomian
15	Armadi	Biro Hukum

B. Swasta

No	Nama	Instansi
	<u>WG Agribisnis</u>	
1	Salahuddin Alfata (<i>co-chairperson</i>)	KADIN
2	M. Isa Idris	KSU Lhok Kuala
3	Hasanuddin	KUD MJ Meulaboh
4	Rusli Haji	KUD MJ Meulaboh
5	Azzohir Mogen	PT. Genap Mupakat
6	Syafrin Rusli	Koperasi Tunas Indah
7	M. Agustiar	PT. Mandago Internasional
8	Iqbal	CV. Putra Rimbun
9	Abdul Manaf Isda	DPC APRI Bireuen
10	Badruddin	Panglima Laot Bireuen
11	Bakhtiar Husen	Ketua Tani Tambak, Bireuen
12	Thamrin Ali	PT. Sinopun
13	T. Syamsir Ulama	PT. Sinopun

14	Razali Idris	APRI NAD
15	Zefriandi Hamzah	HIPKAPI
16	Suhendra	APED UNDP
17	Kismullah	APRI NAD
	<u>WG Pariwisata, Perdagangan & Industri</u>	
18	Dahlan Sulaiman (<i>co-chairperson</i>)	APINDO, ASITA
19	Iskani	APINDO
20	Mustafa Usman	ASITA
21	Muhammad Ranto	ORGANDA B. Aceh
22	Sayed Khabusyah	SHAN'S Bumbu Instan
23	Asnawi	Kopi Ulee Kareng
24	Syarief M. Fadhil	PT. Tenaga Tani Farma
25	Sulaiman	Hermes Palace Hotel
26	Sutrisna	Pedagang
27	Zullya Hakim	Wirausaha
28	Sayed Murshid	Wirausaha
29	Asrul Adamy	Green Paradise
30	Fatmawati	Hotel Rasamala
31	-	PT. Krueng Wayla
32	Syamsidar	Bima
33	Maya Safitri	Grand Nanggroe
34	Nurdin Hidayat	Aceh Explorer
35	Anizar Zainal	IWAPI